

**IMPLEMENTASI YURIDIS PADA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TNI DI  
WILAYAH DENPOM VI/2 BANJARMASIN**

**Suprobo Rini<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Akhmad Munawar<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)**

**Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810419**

**<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)**

**Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501**

**<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)**

**Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1101087301**

**Email: [suprobo.rini07@gmail.com](mailto:suprobo.rini07@gmail.com)**

**ABSTRAK**

**Suprobo Rini, NPM. 18.81.0419.** 2022. *Implementasi Yuridis Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota TNI di Wilayah Denpom VI/2 Banjarmasin.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Dr. Afif Khalid, S.HI,SH, MH., Dr. Akhmad Munawar SH, M.H.

Kata kunci: *Impelementasi, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, TNI*

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah besar yang sedang menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia. Pengedar dan pengguna narkotika tidak memandang status, dalam beberapa kasus didapatkan penggunaan narkotika yang dilakukan seorang anggota militer (TNI). Seorang anggota TNI yang terjerat kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) akan diadili oleh Peradilan militer. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pemberlakuan Undang-Undang narkotika yang mengatur tentang sanksi hukum, diharapkan dapat membantu penyidik pembantu proses penyelesaian perkara anggota TNI yang melakukan tindak pidana peyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini di fokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan hukum pidana dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkotika pada ruang lingkup militer wilayah Denpom VI/2 Banjarmasin, lalu kendala penerapan sanksi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer wilayah Denpom VI/2 Banjarmasin yang melakukan tindak pidana

penyalahgunaan narkoba

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang bersifat kualitatif. Penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan menggali data yang berkenaan dengan topic penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi,. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peradilan militer dalam proses peradilan penyalahgunaan narkoba mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya berkaitan dengan proses acara peradilan di wilayah hukum militer. Pemidanaan bagi seorang Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba para pelaku penyalahgunaan narkoba dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi, namun hal penerapan di wilayah pengadilan militer sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi yaitu pemecatan, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), penurunan pangkat. Hal tersebut merupakan wewenang pengadilan militer atas pertimbangan hakim militer dalam memberikan hukuman.

## ABSTRACT

**Suprobo Rini, NPM. 18.81.0419.** 2022. *Implementasi Yuridis Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anggota TNI di Wilayah Denpom VI/2 Banjarmasin.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Dr. Afif Khalid, S.HI,SH, MH., Dr. Akhmad Munawar SH, M.H.

*Keywords: Implementation, Crime, Narcotics Abuse, TNI*

The crime of narcotics abuse is one of the big problems that are becoming a concern for the Indonesian people. Drug dealers and users do not look at status, in some cases narcotics use was found by a member of the military (TNI). A member of the TNI who is ensnared in a case of violating the law or a criminal act if it is proven that he has committed a crime, both general crimes and military crimes as contained in the military criminal law code (KUHPM) will be tried by a military court. Violations committed by members of the TNI will be processed in accordance with the provisions of the applicable criminal law. The enactment of the Narcotics Law which regulates legal sanctions is expected to assist investigators in the process of resolving cases of TNI members who commit criminal acts of narcotics abuse.

This research focuses on 2 (two) problem formulations, namely how to apply criminal law in terms of preventing narcotics abuse in the military scope of the Denpom VI/2 Banjarmasin area, then the obstacles to implementing sanctions in law enforcement against military members of the Denpom VI/2 Banjarmasin area who committing a crime of drug abuse

This study uses empirical legal research, which is qualitative in nature. Direct research to the research location to find and explore data relating to the research topic. Data collection techniques using interview techniques, documentation. The data obtained in this study were analyzed by qualitative descriptive method.

From this research, it can be concluded that the military court in the narcotics abuse judicial process refers to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Law Number 39 of 1947 concerning the Military Criminal Code and Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts only relate to judicial proceedings in the military jurisdiction. The punishment for a TNI soldier who is proven to have committed a criminal act of narcotics abuse is basically an act of education or coaching. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, perpetrators of narcotics abuse can be given sanctions in the form of rehabilitation, but in terms of application in the area of military courts the sanctions given are in the form of administrative sanctions, namely dismissal, dishonorable discharge (PTDH), demotion. This is the authority of the military court at the discretion of the military judge in giving the sentence.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mulya Sumaperwata, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, (2004), *Peradilan Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Jeanne Mandagi dan Wresniworo, (2016), *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta
- Suhadi, (1996), *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta
- S.R. Sianturi, (2010), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta